

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku dan Makalah

Ali, Mahrus, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

_____, *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia*, Yogyakarta: UII Press, 2011.

Anandya, Diky, *et al.*, *Indonesia Corruption Watch Annual Report 2022*, Jakarta, 2023.

_____, Lalola Easter, *Laporan Hasil Pemantauan Tren Penindakan Korupsi Tahun 2022*, Jakarta, 2023.

Arief, Barda Nawawi, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana :Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Jakarta: Kencana, 2008.

_____, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana, 2010.

C., Adami, *Hukum Pidana materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*, Malang: Bayu Media Publis hing, 2003.

Easter, Lalola, Kurnia Ramadhana, Diky Anandya, *Laporan Penelitian Urgensi Pengaturan Sita Jaminan dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta, 2022.

Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.

Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial (The Legal System A Social Science Perspective*, Bandung: Nusamedia, 2009.

Hamzah, Andi, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010).

Hamzah, Andi, *Korupsi di Indonesia: Masalah dan Pemecahannya*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1991.

Hartanti, Evi, *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.

- Hiariej, Eddy O.S., *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana Edisi Revisi*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016.
- Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, Bandung: Alfabeta CV, 2017.
- Jurdi, Fajlurrahman *Logika Hukum*, Jakarta: Kencana, 2017
- K., Satochid, *Hukum Pidana Bagian Satu*, Jakarta: Balai Lektor Mahasiswa, 2001.
- Klitgaard, Robert, *Membasmi Korupsi*, Jakarta: Yayasan Obor, 1998.
- Kristiana, Yudi, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Perspektif Hukum Progresif*, Yogyakarta: Thafa Media, 2016.
- Mochtar, Zainal Arifin dan Eddy O.S. Hiariej, *Menjerat Korupsi Partai Politik*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2018.
- Muhammad, Abdulkadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, 1998.
- Nurdjana, I.G.M., *Sistem Hukum Pidana Dan Bahaya Laten Korupsi Perspektif Tegaknya Keadilan Melawan Mafia Hukum*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Prakoso, Djoko, *Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 1987.
- Sakidjo, Aruan dan Bambang Poernomo, *Hukum Pidana: Dasar Aturan Hukum Umum Hukum Pidana Kodifikasi*, Jakarta: Balai Aksara, 1990.
- Shokehuddin, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana: Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Soedarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni Bandung, 1996.
- _____, *Hukum Pidana I*, Semarang: Yayasan Sudarto Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 1990.
- _____, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 1986.

Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986.

_____, dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014.

Sugono, Bambang *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.

Sumardjono, Maria, *Bahan Kuliah Metodologi Penelitian Hukum*, Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 2014.

Suparni, Niniek, *Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta: Sinar Grafika, 1996.

Supriyadi, *Bahan Ajar Mata Kuliah Pelaksanaan Pidana* (Yogyakarta, 21),11

Syamsudin, M., *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.

Syarif, Laode dan Didik Purwoleksono, *Hukum Anti Korupsi*, Jakarta: The Asian Foundation, 2012.

Waluyo, Bambang, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

_____, *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

Wijayanto, Roni, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, 2012.

Wiyono, R, *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.

2. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 140 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874).

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 134 Tahun 2001, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5).

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption*.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara *United Nations Convention Against Corruption 2003*

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020).

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti dalam Tindak Pidana Korupsi.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

3. Putusan Pengadilan

Putusan PT Yogyakarta Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2022/PT Yyk perihal banding atas nama Pembanding Erny Kusumawati

Putusan PT Yogyakarta Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2022/PT Yyk perihal banding atas nama Pembanding Lintang Patria Anantya Rukmi, S.E

Putusan PN Yogyakarta Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2021/PN Yyk perihal perkara atas nama Terdakwa Ari Wahyuningsih, S.Pd., S.E.

Putusan PN Yogyakarta Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Yyk perihal perkara atas nama Terdakwa Erny Kusumawati.

Putusan PN Yogyakarta Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2021/PN Yyk perihal perkara atas nama Terdakwa Lintang Patria Anantya Rukmi, S.E.

4. Artikel Jurnal

Ali, Mahrus. "Proporsionalitas dalam Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana." *Ius Quia Iustum* 25, no.1 (Januari 2018): 137-158.

Akmaluddin. "Nowadays Problems Of Bahasa Indonesia: An Analysis Of Mistakes In Written Forms." *Mabasan* 10, no.2, (Desember 2016): 63-84.

Anindyajati, Titis, Irfan Nur Rachman, dan Anak Agung Dian Onita. "The Constitutionality of Criminal Sanction Norms as *Ultimum Remedium* in the Making of Laws." *Jurnal Konstitusi* 12, no. 4, (Desember 2015): 1-21.

Damanik, Kristwan Genova. "Antara Uang Pengganti dan Kerugian Negara dalam Tindak Pidana Korupsi." *Masalah-Masalah Hukum* 45, no. 1, (Januari 2016): 9.

Hiariej, Eddy O.S. "United Nations Convention Against Corruption dalam Sistem Hukum Indonesia." *Mimbar Hukum* 31, no.1 (Februari 2019): 112-125. <https://doi.org/10.22146/jmh.43968>.

Juandra, Mohd. Din, Darmawan. "Kewenangan Hakim Menjatuhkan Pidana Uang Pengganti dalam Perkara Korupsi yang Tidak Didakwakan Pasal 18 UU Tipikor." *Jurnal Ius Constituendum* 6, no. 2 (Oktober 2021): 442-460.

Junianto, Johan Dwi. "Obstruction of Justice dalam Pasal 21 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi." *Media Iuris* 2, no. 3 (Oktober 2019): 335-352.

M., Dwiki dan I Wayan Novy P. "Pengaturan Pembayaran Uang Pengganti Terhadap Korporasi dalam Undang_Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi." *Jurnal Kertha Wicara* 9, no. 6 (2020), 1-8.

Mahmud, Ade. "Dinamika Pembayaran Uang Pengganti dalam Tindak Pidana Korupsi." *Jurnal Hukum Mimbar Justicia* 3, no. 2 (Desember 2017): 137-156.

Ng, Hansel Kalama, Hery Firmansyah. "Urgensi Sistem Hukum Berbasis *Legal Community Empowerment* Dalam Upaya Meminimalisasi Korban Perdagangan Untuk Tujuan Seksual Terhadap Perempuan Di Indonesia," *Era Hukum* 2, no. 2 (Oktober 2017): 234-266.

- Pahlevi, Billy. “Kelemahan Normatif Pengaturan Tindak Pidana Dalam Pasal 2 Dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Dan Perubahannya Serta Upaya Penyempurnaannya Dalam Rangka Pemenuhan Kewenangan Direksi Bumd Yang Berbentuk Perseroan.” *Legal Spirit* 4, no. 1 (2020): 1-16.
- Putra, Ferdianto, Otong Rosadi, dan Iyah Faniyah. “Kajian Futuristik Terhadap Pengaturan Bentuk dan Sanksi Tindak Pidana Korupsi di Indonesia.” *Swara Justisia* 4, no. 4 (Januari 2021): 322-331.
- Saifuddin, Bandaharo. “Dampak dan Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia.” *Jurnal Warta Dharmawhangsa*, no. 52 (April 2017): 1-15. <https://doi.org/10.46576/wdw.v0i52.259>.
- Saputra, Refki. “Tantangan Penerapan Perampasan Aset Tanpa Tuntutan Pidana (*Non-Conviction Based Asset Forfeiture*) dalam RUU Perampasan Aset di Indonesia.” *Jurnal Integritas* 3, no. 1 (Maret 2017): 115-130.
- Simarmata, Lasmauli Noverita. “Korupsi Sekarang dan Yang Akan Datang.” *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 11, no. 2 (Maret 2021): 87-99.
- Suryanto, Ahmad Fahd Budi. “Penegakan Hukum dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Suap Menyuap dan Gratifikasi di Indonesia.” *Dharmasisya* 1, no. 2 (Juni 2021): 589-600.
- S., Michael A. and Paul W. Beamish. “*Private Sector Corruption, Public Sector Corruption and the Organizational Structure of Foreign Subsidiaries.*” *Journal of Business Ethics* 167, no. 4 (April 2019): 725-744.

5. Hasil Penelitian/Tugas Akhir

- Budi, Aprianta. “Penyitaan Aset Milik Tersangka Berkaitan dengan Pidana Pembayaran Uang Pengganti dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi,” Tesis, Universitas Gadjah Mada, 2020.
- Destias, Deris. “Efektivitas Eksekusi Pidana Denda Terhadap Terpidana Perkara Tindak Pidana Korupsi,” Skripsi, Universitas Islam Indonesia, 2021.
- Faajra, Annarentika. “Pelaksanaan Putusan Pengadilan Pidana Uang Pengganti Oleh Komisi Pemberantasan Korupsi,” Skripsi, Universitas Gadjah Mada, 2018.

- Harwiadi, R. “Upaya Pengembalian Kerugian Negara melalui Penerapan Pidana Tambahan Pembayaran Uang Pengganti dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi,” Tesis, Universitas Gadjah Mada, 2017.
- Hidayat, Mohammad Taufik, “Analisis Komparasi Ancaman Pidana Penjara dalam Pasal 2 dan Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,” Skripsi, Universitas Tanjungpura, 2017.
- J., Dewi Bella. “Peran Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi yang Dilakukan oleh Anggota Tentara Nasional Indonesia,” Skripsi, Universitas Gadjah Mada, 2021.
- Nandita, Ni Nengah Dhea Riska Putri. “Urgensi Pemeriksaan Bedah Mayat dalam Pembuktian Tindak Pidana Pembunuhan,” Skripsi, Universitas Gadjah Mada, 2021.
- Nazikha, Frellyka Indana Ainun. “Pelaksanaan Sanksi Pidana Tambahan Uang Pengganti dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Keuangan Negara” Thesis, Universitas Islam Indonesia, 2015.
- Prameswari, Sema Hardjo Aulia. “Sistem Pemidanaan Tindak Pidana Korupsi dalam Perspektif Perbandingan Hukum Pidana Indonesia dan Malaysia,” Skripsi, Universitas Mataram, 2020.
- Anandayoga, I Gede Bagus Putu. “Pembaharuan Hukum Pidana Materiil dalam Rangka Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,” Tesis, Universitas Gadjah Mada, 2017.
- T.Y., Armita. “Pidana Tambahan Uang Pengganti terhadap Terpidana Korupsi yang Dijatuhi Pidana Penjara Seumur Hidup,” Skripsi, Universitas Gadjah Mada, 2022.
- Yadyn. “Problematika Penegakan Hukum Di Indonesia Menuju Hukum Yang Responsif Berlandaskan Nilai-Nilai Pancasila,” Tesis, Universitas Hassanudin, 2012.

6. Internet

- Ariedwie. “214 Napi Koruptor Dapat Remisi Hari Kemerdekaan.” <https://nasional.sindonews.com/read/517648/13/214-napi-koruptor-dapat-remisi-hari-kemerdekaan-berikut-rinciannya-1629529683> (diakses pada 17 Juli 2023).
- Aritonang, Rasamala. “Memidana Korporasi.” <https://antikorupsi.org/id/article/memidana-korporasi> (diakses pada 21 Juli 2023).

Athifah, Nienda Farras. “Data ICW 2022: Kerugian Negara Akibat Korupsi Capai Rp 42,727T” <https://www.metrotvnews.com/play/NP6CZ1EX-data-icw-2022-kerugian-negara-akibat-korupsi-capai-rp42-727-t> (diakses pada 1 Juli 2023).

Bayu, Dimas. “Kerugian Negara Akibat Korupsi Capai Rp62.93 Triliun pada 2021.” <https://dataindonesia.id/ragam/detail/kerugian-negara-akibat-korupsi-capai-rp6293-triliunpada2021> (diakses pada 10 November 2022).

Drajad, Ahmad. “Kendala Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana Korupsi.” https://website.pn-medankota.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=384:kendala-penerapan-sanksi-pidana-terhadap-korporasi-sebagai-pelaku-tindak-pidana-korupsi&catid=101:kumpulan-artikel&Itemid=638 (diakses pada 19 Juli 2023).

Dspace.uui.ac.id “Hukum Pidana.” <https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/2747/05.2%20bab%202.pdf?sequence=9&isAllowed=y> (diakses pada 19 Juli 2023).

Elsam.or.id. “Aturan Perilaku Bagi Aparat Penegak Hukum,” <https://referensi.elsam.or.id/wp-content/uploads/2014/10/aturan-perilaku-aparat-penegak-hukum-ccleo.pdf> (diakses pada 2 Juli 2023).

Esaunggul.ac.id. “Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor.” <https://lms-paralel.esaunggul.ac.id/> (diakses pada 1 Juli 2023).

FNH. “Sekali Lagi, Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor.” <https://www.hukumonline.com/berita/a/sekali-lagi--pasal-2-dan-pasal-3-uu-tipikor> (diakses pada 2 Juli 2023).

Kamil, Irfan. “ICW: Pengembalian Kerugian Negara pada Kasus Tindakan Korupsi Belum Maksimal.” <https://nasional.kompas.com/read/2022/03/28/19444581/icw-pengembalian-kerugian-negara-pada-kasus-tindakan-korupsi-belum-maksimal#:~:text=Berdasarkan%20catatan%20ICW%2C%20ujar%20Kurnia,mencapai%20Rp%2024%2C4%20triliun> (diakses pada 9 November 2022).

Kusnandar, Viva Budy. “ICW : Kerugian Negara Akibat Korupsi Rp. 62,9 Triliun pada 2021.”

<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/05/23/icw-kerugian-negara-akibat-korupsi-rp629-triliun-pada-2021> (diakses pada 24 Oktober 2022).

_____. “Jumlah Perkara dan Terdakwa Korupsi (2018-2021).

<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/05/24/sidang-perkara-korupsi-meningkat-di-masa-pandemi> (diakses pada 11 November 2022).

M. A., Cindy. “Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Memburuk pada 2022.”

<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/02/01/indeks-persepsi-korupsi-indonesia-memburuk-pada-2022> (diakses pada 14 Februari 2023).

Mkri.id. “Ahli: Ancaman Penerima Gratifikasi dalam UU PTPK Tidak Proporsional dan Diskriminatif.”

<https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=9023> (diakses pada 3 Juli 2023).

Nurita, Dewi. “Kerugian Akibat Korupsi Rp. 62 T di 2021, ICW Kritik KPK Cuma Tangani 1 Person.”

<https://nasional.tempo.co/read/1594071/kerugian-akibat-korupsi-rp62-t-di-2021-icw-kritik-kpk-cuma-tangani-1-persen> (diakses pada 24 Oktober 2022).

Nuryanto. “Rugikan Negara Rp 27 Miliar, Dua Tersangka Baru Kasus Kredit Fiktif Bank Jogja Dijerat UU TPPU.”

<https://www.tvonenews.com/daerah/yogyakarta/71058-rugikan-negara-rp-27-miliar-dua-tersangka-baru-kasus-kredit-fiktif-bank-jogja-dijerat-uu-tppu> (diakses pada 15 Desember 2022).

Newswire. “Proyek Stadion Mandala Krida Jogja Dikorupsi, Negara Rugi Rp 31,7 Miliar.”

<https://www.solopos.com/proyek-stadion-mandala-krida-jogja-dikorupsi-negara-rugi-rp317-miliar-1372964> (diakses pada 14 Desember 2022).

Pahlevi, Reza. “Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Naik 1 Poin Jadi 38 pada 2021.”

<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/01/26/indeks-persepsi-korupsi-indonesia-naik-1-poin-jadi-38-pada-2021> (diakses pada 29 September 2022).

Rianto, Fajar. “Terlibat Korupsi, Tiga Pegawai Bank Jogja Divonis 6 Tahun Penjara.”

<https://timesindonesia.co.id/hukum->

kriminal/423473/terlibat-korupsi-tiga-pegawai-bank-jogja-divonis-6-tahunpenjara (diakses pada 10 Desember 2022).

Riyadi. “Aktori Kredit Fiktif Bank Jogja, Tito Sudarmanto Divonis 16 Tahun Penjara.” <https://timesindonesia.co.id/hukum-kriminal/449974/aktori-kredit-fiktif-bank-jogja-tito-sudarmanto-divonis-16-tahun-penjara> (diakses 30 Mei 2023).

Sudut Hukum. “Pidana dan Pemidanaan.” <https://suduthukum.com/2017/03/pidana-dan-pemidanaan.html> (diakses pada 19 Juli 2023).

Stya, Trada. “Apa yang Dimaksud dengan Suap Menyuaup?.” <https://bcbojonegoro.beacukai.go.id/ufaqs/apa-yang-dimaksud-dengan-suap-menyuaup/> (diakses pada 2 Juli 2023).

STH Indonesia Jentera. “Diskusi Pemaknaan Pasal 2 dan 3 UU Korupsi: Norma dan Praktiknya.” <https://www.jentera.ac.id/kabar/diskusi-pemaknaan-pasal-2-dan-3-uu-korupsi-norma-dan-praktiknya> (diakses pada 2 Juli 2023).

Tim CNN. “Indeks Persepsi Korupsi RI Turun Jadi 34, Terburuk Sepanjang Reformasi.” <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230131132804-12907033/indeks-persepsikorupsi-ri-turun-jadi-34-terburuk-sepanjang-reformasi> (diakses pada 19 Februari 2023).

7. Hasil Wawancara

Hasil Wawancara dengan Devi Love Marbuhal Oktario Hutapea, S.H., M.H. selaku koordinator pada Kejati DIY.

Hasil Wawancara dengan Binsar Pantas Sihaloho, S.H., M.H. selaku Hakim Ad Hoc Tipikor pada Pengadilan Negeri Yogyakarta.

Hasil wawancara dengan Ramadan Tabiu, S.H., LL.M., selaku Dosen Hukum Pidana Universitas Halu Oleo.

Hasil Wawancara dengan Dr. Mahrus Ali, S.H., M.H., selaku Dosen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Hasil Wawancara dengan Diky Anandya selaku Peneliti pada Divisi Hukum dan Monitoring Indonesia Corruption Watch (ICW)